

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

UU No 7 Tahun 1996 tentang pangan mendefinisikan ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional pada subsistem ketersediaan, pemerintah melakukan alternatif kebijakan yaitu dengan menjaga ketersediaan pangan yang berasal dari dua sumber, yaitu dalam dan luar negeri. Upaya pengadaan ketersediaan pangan dari dalam negeri dilakukan pemerintah dengan peningkatan produksi pangan dalam negeri, sedangkan pengadaan ketersediaan pangan dari luar negeri dilakukan pemerintah dengan kegiatan impor.

Jumlah impor beras yang dicanangkan pemerintah berfluktuasi setiap tahunnya. Sejak Tahun 2005 hingga Tahun 2009, rata-rata pertumbuhan impor beras di Indonesia mencapai 64, 80%. Selama bulan Januari hingga September 2011, tercatat beras Vietnam yang masuk ke Indonesia sebanyak 1,14 juta ton. Sementara untuk beras dari Thailand, volume impor beras sepanjang tahun 2011 adalah sebanyak 720,2 ribu ton. Pada bulan September hingga Oktober 2011, gudang Bulog Lampung telah memperoleh penambahan stok beras dari Vietnam sebanyak 13.160 ribu ton (Lampung Post, 2011).

Kebijakan impor yang dilakukan terus-menerus oleh pemerintah justru akan mengancam ketahanan pangan nasional. Selain itu, kebijakan impor pun dapat mengancam kondisi diberbagai bidang, bukan hanya politik tetapi juga sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan yang berasal dari dalam negeri dengan peningkatan produksi beras perlu terus diupayakan. Peningkatan produksi beras dalam negeri tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas padi di Provinsi Lampung tahun 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas padi di Provinsi Lampung tahun 2006-2010

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2006	494.102	2.129.914	4,31
2007	524.955	2.308.404	4,40
2008	509.222	2.339.985	4,45
2009	570.410	2.673.844	4,68
2010	590.608	2.807.676	4,75
Rataan	517.184,7	2.289.633,4	4,40

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2011

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir perkembangan produksi dan produktivitas padi di Lampung berfluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh luas panennya. Sejak tahun 2006-2010, produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 4,75 ton/ha dengan peningkatan luas panen dari tahun sebelumnya seluas 20.198 ha. Peningkatan luas panen tersebut dikarenakan adanya program ekstensifikasi lahan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memanfaatkan lahan

sementara tidak diusahakan (BPS, 2011). Peningkatan produktivitas padi di Lampung tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memegang peranan penting dalam penyediaan beras dalam negeri khususnya di Provinsi Lampung yang bersumber dari beberapa sentra padi di dalam provinsi.

Sentra produksi padi terbesar di Provinsi Lampung hingga Tahun 2010 terdapat di Kabupaten Lampung Tengah dengan produksi 623.779 ton. Produksi padi terbesar kedua dan ketiga di Provinsi Lampung terdapat di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan dengan produksi masing-masing sebesar 449.662 ton dan 393.622 ton. Tingginya angka produksi padi di kedua kabupaten tersebut sangat dipengaruhi oleh luas panennya. Produksi padi per kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Produksi tanaman padi per kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2010 (dalam ton)

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1. Lampung Tengah	127.020	623.779	4,91
2. Lampung Timur	89.845	449.662	5,00
3. Lampung Selatan	79.717	393.622	4,96
4. Tanggamus	42.625	214.445	5,31
5. Tulang Bawang	42.938	191.770	4,47
6. Lampung Barat	39.480	170.457	4,32
7. Lampung Utara	37.763	153.289	4,06
8. Way Kanan	35.269	144.421	4,09
9. Pesawaran	28.266	142.859	5,05
10. Mesuji	25.496	114.727	4,50
11. Pringsewu	21.770	111.918	5,14
12. Metro	4.440	23.130	5, 21
13. Bandar Lampung	1.804	9.220	5,11
Provinsi Lampung	570.417	2.674.844	4,69

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Lampung, 2011

Tanggamus dan Pringsewu adalah dua kabupaten baru dari hasil pemekaran satu kabupaten yaitu Tanggamus yang di sahkan pada Oktober 2008.

Berdasarkan Tabel 2 Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu masing-masing menempati peringkat keempat dan kesebelas dari tiga belas kabupaten lain dengan jumlah produksi padi pada Tahun 2010 masing-masing sebanyak 214.445 ton dan 111.918 ton. Jika dilihat dari produktivitasnya, dua kabupaten ini memiliki produktivitas yang lebih tinggi dari sentra produksi padi yang ada di Lampung, yaitu Lampung Tengah. Meskipun demikian, produktivitas padi di dua kabupaten tersebut pun masih berada di bawah potensi produksi padi varietas unggul yang mampu mencapai 6,00-7,00 ton/ha. Dengan demikian, maka kesempatan Tanggamus dan Pringsewu untuk meningkatkan produksi padi masih sangat memungkinkan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan dan peningkatan pendapatan petani.

Pemerintah sangat mengupayakan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian terutama padi melalui pengembangan berbagai program. Namun yang menjadi masalah adalah meskipun telah terjadi peningkatan dalam produksi dan produktivitas padi, hal tersebut belum mampu meningkatkan nilai tukar komoditas padi. Oleh karena itu, kegiatan usahatani padi belum dapat memberikan keuntungan yang layak bagi para petani padi serta menjadikan petani padi sebagai petani pengusaha dan petani mandiri.

Penanaman serempak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesenjangan-kesenjangan yang dialami oleh petani padi. Dengan dilakukannya penanaman serempak maka waktu panen pun akan tiba serempak pula, sehingga ketersediaan hasil panen pada saat itu sangat

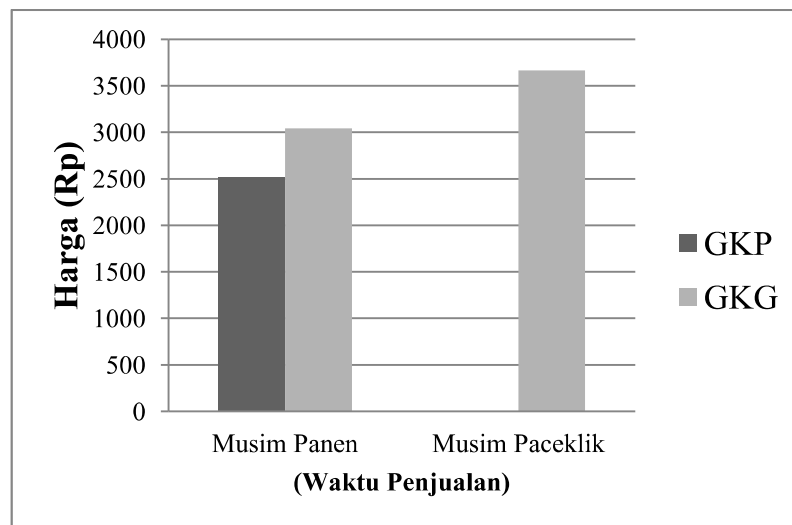
melimpah dan mengakibatkan nilai jual komoditas padi pada saat panen raya relatif rendah.

Kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh para petani mendesak mereka untuk segera menjual hasil panennya agar segera memperoleh uang tunai. Selain itu, kewajiban-kewajiban yang dimiliki petani baik untuk modal dalam usahataniya ataupun untuk mencukupi kebutuhan mereka pun merupakan faktor petani padi langsung menukarkan hasil panennya dengan uang (Deptan, 2006). Tentu saja tindakan petani tersebut semakin memperparah nilai hasil pertaniannya dan menjadikan petani sebagai *price taker*. Hal tersebut membuktikan teori penawaran dalam ilmu ekonomi yang menyebutkan bahwa semakin banyak barang yang ditawarkan maka tingkat harga yang diterima akan semakin rendah (Sukirno, 2005).

Penyimpanan hasil panen dalam jangka waktu tertentu merupakan salah satu alternatif yang paling baik untuk menekan melimpahnya peredaran barang yang ada di pasar. Petani akan bertindak sebagai *price maker* ketika mereka menjual hasil panennya pada saat musim paceklik dan memiliki fleksibilitas serta posisi tawar yang lebih kuat. Harga padi pun lebih tinggi jika dibandingkan pada saat panen raya. Oleh karena itu, pada kondisi tersebut berlaku teori permintaan dalam ilmu ekonomi yaitu semakin sedikit barang yang ditawarkan di pasar, maka harga dari barang tersebut akan semakin tinggi (Daniel, 2004).

Kisaran harga gabah di Lampung tahun 2010 sangat berfluktuatif.

Ketidaksetabilan harga tersebut disebabkan oleh jumlah ketersediaanya yang tentunya sangat dipengaruhi oleh musim, yaitu musim panen dan musim paceklik. Adapun kisaran harga gabah di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Dinas Petanian Provinsi Lampung Tahun 2011

Gambar 1. Kisaran harga gabah di Lampung Tahun 2010

Pada Gambar 1 dapat diketahui bahwa terdapat selisih rata-rata harga Gabah Kering Giling (GKG) pada musim panen dengan musim paceklik dengan selisih harga sebesar Rp622,50 per kilogramnya. Rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) pada musim panen sebesar Rp2.517,00 dengan kisaran Rp2.345,00 sampai Rp2.690,00. Rata-rata harga GKG pada musim panen dan musim paceklik masing-masing sebesar Rp3.040,00 dan Rp3.662,50. Harga GKG pada saat panen raya berkisar Rp2.880,00 sampai Rp3.200,00 dan pada saat paceklik berkisar Rp3.500,00 sampai Rp3.825,00 (Deptan, 2011).

Tunda jual adalah salah satu alternatif kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dalam rangka menghadapi adanya fluktuasi harga komoditas pertanian yang terjadi. Kebijakan tersebut dilakukan dengan penundaan penjualan dengan pola gadai gabah. Sejalan dengan tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, maka kearifan lokal lumbung desa dapat menjadi alternatif yang dapat diterapkan dan dikembangkan untuk mengantisipasi terjadinya peluapan komoditas padi pada saat panen raya.

Lumbung adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan hasil panen oleh para petani pada saat panen raya dan akan dibongkar pada saat menjelang musim paceklik yang biasanya terjadi sebelum musim tanam berikutnya.

Lumbung dikenal sebagai cadangan pangan di pedesaan dan sebagai penolong pada musim paceklik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2008 tentang cadangan pangan pemerintah desa, lumbung desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa. Lumbung desa tersebut memiliki fungsi sebagai cadangan pangan untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri, serta untuk menghadapi keadaan darurat (*transien*), rawan pangan, dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat. Menurut Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah No 6 Tahun 2001 tentang pengembangan lumbung pangan masyarakat/kelurahan menyatakan bahwa Lumbung Pangan Masyarakat Desa merupakan lembaga milik rakyat desa/kelurahan yang bergerak dibidang pendistribusian, pengelolaan dan perdagangan bahan baku pangan yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.

Program pembangunan sistem dan kelembagaan lumbung desa merupakan upaya pemberdayaan petani untuk mengatasi gejolak harga gabah dengan mengembangkan manajemen stok disertai distribusi secara optimal yang mempunyai tiga tujuan. Pertama, untuk mengintegrasikan subsistem produksi dan pasar sehingga menjamin adanya kepastian harga produk tanaman pangan yang dapat memperbaiki pendapatan petani. Kedua, untuk memasyarakatkan dan memperkuat sistem lumbung pangan untuk meningkatkan nilai tambah produk tanaman pangan dan ketahanan pangan. Ketiga, untuk mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan agribisnis tanaman pangan (Nurgani, 2007).

Tiga tujuan pembangunan lumbung menjadi alasan bagi pemerintah untuk mulai menggalakkan kembali lumbung padi akhir-akhir ini. Selain itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pun turut ambil bagian dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dengan ikut mengaktifkan kembali lumbung padi di pedesaan (Seputar Indonesia, 2011). Pemerintah Provinsi Lampung pun tidak ingin tertinggal untuk turut berupaya menggalakkan kembali lumbung-lumbung yang ada di daerah-daerah Provinsi Lampung dan mengaktifkan kembali serta menginventarisir lumbung-lumbung yang sudah ada (Radar Lampung, 2011).

Pringsewu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang masih mampu melestarikan kebudayaan produktif atau kearifan lokal yaitu menerapkan penyimpanan hasil panen berupa gabah dalam lumbung, yaitu lumbung dusun dan lumbung rumah tangga (lumbung sendiri) khususnya di

Desa Sumberagung. Namun, kondisi di Desa Sumberagung tersebut bertolak belakang dengan di Mulangmaya, Kotaagung Timur, Tanggamus. Meskipun kabupaten ini memiliki produksi padi yang jauh lebih tinggi dari Pringsewu dengan selisih sebesar 31%, namun masyarakatnya tidak ada yang melakukan penyimpanan hasil panennya dalam bentuk gabah.

Petani di Desa Mulangmaya memiliki kebiasaan setelah selesai melakukan pemanenan dan penjemuran langsung menjual gabahnya tanpa melakukan penyimpanan untuk menunggu harga tinggi. Meskipun ada petani yang melakukan penyimpanan, penyimpanan tersebut dilakukan hanya untuk keperluan konsumsi keluarga saja hingga datangnya musim panen berikutnya dalam bentuk beras. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji seberapa besar manfaat ekonomi dari penerapan lumbung dusun dan lumbung rumah tangga bagi para petani serta risiko harga terhadap penyimpanan hasil panen dalam bentuk gabah bagi para petani di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Seberapa besar manfaat ekonomi Lumbung Dusun Nuju Mulyo bagi para petani anggota di Desa Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu?
2. Seberapa besar manfaat ekonomi lumbung rumah tangga bagi para petani pelaku penyimpanan di Desa Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu?

3. Seberapa besar risiko harga yang diterima petani yang melakukan penyimpanan dan yang tidak melakukan penyimpanan gabah di lumbung rumah tangga di Desa Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu dan di Desa Mulangmaya, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui manfaat ekonomi Lumbung Dusun Nuju Mulyo bagi para petani anggota di Desa Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu
2. Mengetahui manfaat ekonomi lumbung rumah tangga bagi para petani pelaku penyimpanan di Desa Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu
3. Mengetahui besarnya risiko harga yang diterima petani yang melakukan penyimpanan dan yang tidak melakukan penyimpanan gabah di lumbung rumah tangga di di Desa Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu dan di Desa Mulangmaya, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Pemerintah dan instansi terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait ketersediaan pangan pokok dan harga gabah
2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi pembandingan
3. Bagi petani, sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola usahatannya terutama pada perlakuan pasca panennya.